

ANALISIS TATA KELOLA KONFLIK SUMBER DAYA PARIWISATA

OLEH

LARAS RETNO WULANDHARIE 2326061006



MAGISTER ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2024

ANALISIS TATA KELOLA KONFLIK SUMBER DAYA PARIWISATA

(Desa Wisata Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran)

EXCECUTIVE SUMMARY

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Seperti halnya yang terjadi di desa Pulau Pahawang, Kecamatan Marga Punduh, Kabupaten Pesawaran. Adanya pengembangan sektor pariwisata dengan obyek wisata Pahawang telah mengubah perekonomian masyarakat desa Pulau Pahawang. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan obyek wisata tersebut muncul berbagai permasalahan yang berujung konflik. Konflik yang terjadi disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana obyek wisata Pahawang dianggap sebagai asset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Pahawang disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan serta masih ada tumpang tindih regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kabupaten Pesawaran.

INTRODUCTION

Pembangunan sektor pariwisata merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan ekonomi masyarakat baik di tingkat lokal maupun global. Sektor pariwisata kini telah menjadi kebutuhan global. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat sangat berpengaruh terhadap perkembangan industri, termasuk industri pariwisata. Saat ini industri pariwisata merupakan bagian dari salah satu sentral penghasil devisa bagi negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Oleh karena itu, pariwisata sangat masuk akal ditetapkan menjadi leading sector pembangunan karena dapat menggerakkan perekonomian bangsa. Pariwisata Indonesia menjadi salah satu sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah, dan menjadi salah satu penyumbang devisa Negara. Selain itu, pariwisata juga memberi dampak pada pembangunan dunia, kemakmuran dan kesejahteraan. Oleh

karena itu, penyelenggaraan pariwisata perlu dijaga keberlangsungannya. Pariwisata berkelanjutan merupakan pariwisata yang menghormati penduduk setempat dan wisatawan lain, warisan budaya dan lingkungan. Terdapat 3 (tiga) pilar yang harus diseimbangkan agar pembangunan pariwisata berkelanjutan dapat berlangsung dalam jangka panjang yaitu pilar sosial (community), pilar lingkungan (environment) dan pilar ekonomi (economy).

Desa wisata berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan dari level akar rumput, dengan mengikutsertakan penduduk lokal pada mata rantai wisata dan pembinaan pendidikan, keterampilan dan pengelolaan lokal. Kearifan lokal sebagai dasar pembangunan berkelanjutan dalam pariwisata pedesaan yang dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah partisipasi masyarakat. Wisata pedesaan dianggap sebagai daya tarik dalam destinasi yang secara signifikan merangsang pertumbuhan ekonomi, khususnya untuk komunitas lokal. Pengembangan pariwisata daerah pedesaan adalah dampak dari perubahan minat wisatawan ke daerah turis tujuan. Tren yang berkembang dan motivasi perjalanan wisata khusus untuk kembali ke alam untuk berinteraksi dengan komunitas lokal dan minat untuk mempelajari keunikan budaya lokal mendorong pengembangan pariwisata di daerah pedesaan.

Kabupaten Pesawaran merupakan salah satu kabupaten di provinsi Lampung yang mempunyai sumber daya yang melimpah pada bidang pariwisata. Di balik keberhasilan dalam pengembangan dan pengelolaan obyek wisata pulau Pahawang di sisi lain mulai memunculkan konflik dalam pengelolaan pariwisatanya. Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dapat terjadi dalam proses interaksi sosial sehari-hari, baik antara sesama individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok masyarakat dengan pemerintah dan lainnya, semua itu berpotensi terjadinya konflik. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan atau adanya berbagai perbedaan pendapat dalam individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Pahawang disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana keberadaan Pahawang yang dikelola sebagai obyek wisata dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi yang dimaksud terlihat jelas dengan adanya peningkatan

pendapatan yang begitu pesat dihasilkan oleh obyek wisata Pahawang setiap tahunnya. Selain adanya peningkatan dari segi pendapatan. Pengembangan obyek wisata ini, membuka peluang untuk masyarakat setempat dengan terbukanya lapangan pekerjaan baru dan penyerapan tenaga kerja dalam mengelola obyek wisata ini. Selain penyerapan tenaga kerja, pengelolaan obyek wisata Pahawang juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru. Hal ini tercermin dengan adanya penyerapan pedagang di area pengembangan obyek wisata Pahawang.

Konflik ini bermula ketika pemerintah desa pulau pahawang menetapkan Peraturan Desa No 2 tahun 2023 tentang pungutan desa yang didasarkan atas Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepariwisata. Namun, penerapan perdes yang mewajibkan wisatawan membayar retribusi Rp 10.000 dikeluhkan pelaku jasa wisata. Hal ini menimbulkan konflik antara pemerintah desa dengan pelaku jasa wisata. Konflik ini terjadi disebabkan oleh Peraturan yang tumpang tindih, kurangnya publikasi peraturan pariwisata, pengelolaan wisata yang belum profesional, pertentangan pemerintah desa dengan pelaku jasa wisata, belum baiknya infrastruktur, masih kurangnya investasi terhadap wisata serta penggunaan dana desa yang terbatas yang mengakibatkan pembangunan destinasi dan fasilitas menjadi terhambat, keberlanjutan pengelolaan pariwisata menjadi terhambat dan capaian PADes yang rendah.

Menurut pemerintah desa pulau pahawang retribusi tersebut diberlakukan agar keberlanjutan pariwisata di Pahawang berjalan dengan baik dengan perbaikan destinasi dan fasilitasnya. Namun menurut pelaku jasa wisata, dalam penerapan peraturan tersebut mereka tidak mendapatkan sosialisasi terkait penerapan perdes tersebut serta pungutan masuk Desa Pulau Pahawang dilakukan di tanah dengan status hak milik perorangan/pribadi, bukan milik pemerintah/desa. Stakeholder yang terlibat dalam konflik ini terdiri dari Lembaga pemerintah, komunitas dan BUMN. Lembaga pemerintah yang terlibat dalam konflik ini adalah Pemerintahan Desa, BUMDes sedangkan komunitas atau masyarakat yang terlibat dalam konflik ini adalah pelaku jasa wisata dan pemilik UMKM di dermaga Ketapang.

Adanya konflik yang terjadi di dalam pengelolaan obyek wisata Pahawang berdampak pada berkurangnya tingkat kerukunan dalam masyarakat, bahkan diantara kelompok masyarakat saling curiga menunjukkan bahwa adanya dampak negative dari konflik tersebut yaitu perpecahan. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Obyek Wisata Pahawang berdampak pada prasangka-prasangka negatif yang timbul di tengah masyarakat. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya prasangka-prasangka negative ditengah masyarakat yaitu dapat menimbulkan ketidak nyamanan yang dirasakan setiap masyarakat.

Dalam memahami konflik yang terjadi pada komunitas wisata desa Pulau Pahawang dilakukan analisis konflik dengan berbasis community based tourism. Community-Based Tourism dapat membantu masyarakat lokal dalam menghasilkan pendapatan, mendiversifikasi ekonomi lokal, melestarikan budaya, melestarikan lingkungan dan menyediakan peluang pendidikan. CBT dipahami untuk dikelola dan dimiliki oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Jenis pariwisata ini akan melibatkan partisipasi masyarakat baik sebagai pelaku langsung maupun sebagai pendukung pariwisata.

METHODE APPROACH

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data atau informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Menurut Moleong (2001), penelitian deskriptif kualitatif yakni sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati yang diarahkan untuk menjelaskan hal-hal atau masalah yang terjadi dan digambarkan sesuai dengan fokus masalah penelitian. Metode penelitian ini digunakan oleh peneliti dengan tujuan untuk mengungkapkan fakta dan femonena yang di temukan dalam menentukan model tata kelola konflik pengelolaan obyek wisata pulau pahawang.

RESULT BODY

Tidak bisa dipungkiri bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya konflik dapat terjadi dalam proses interaksi sosial sehari-hari, baik antara sesama individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, kelompok masyarakat dengan pemerintah dan lainnya, semua itu berpotensi terjadinya konflik. Konflik terjadi ketika tujuan masyarakat tidak sejalan atau adanya berbagai perbedaan pendapat dalam individu maupun kelompok sosial dalam masyarakat. Konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata pulau pahawang disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka kesempatan untuk dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berkepentingan, dimana keberadaan pulau pahawang yang dikelola sebagai obyek wisata dianggap sebagai aset berharga yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian. Struktur ekonomi yang dimaksud terlihat jelas dengan adanya peningkatan pendapatan yang begitu pesat dihasilkan oleh obyek wisata pulau pahawang setiap tahunnya. Peningkatan pendapatan tersebut dapat kami sajikan sebagai berikut ;

Jumlah Pelaku Pariwisata Pulau Pahawang

No	Elemen Sampel	Jumlah Populasi
1	Pengrajin Industri Rumah Tangga	37
2	Pengusaha Kecil dan Menengah	24
3	Pemilik <i>Homestay</i>	248
4	Pemilik spot snorkling	15
	Jumlah	324

Jumlah *Homestay*

Lokasi	Jumlah <i>Homestay</i>	Keterangan
Dusun 1	20	<i>Homestay</i> terdiri dari rumah warga dan <i>homestay</i> yang sengaja dibangun untuk kepentingan pariwisata.
Dusun 2	108	
Dusun 3	90	
Dusun 4	19	
Dusun 5	4	
Dusun 6	7	

**Jumlah Pengunjung Obyek Wisata Pahawang
(Tahun 2019- Tahun 2023)**

Januari	498	890	1570	2019
Februari	345	654	612	878
Maret	333	765	542	987
April	232	876	459	789
Mei	569	989	1679	762
Juni	453	654	765	834
Juli	238	409	569	600
Agustus	780	1098	1278	2156
September	652	876	900	1200
Oktober	451	980	925	1567
Nopember	412	567	838	3987
Desember	321	657	1679	5078
Total	5284	9415	11816	20857
Rata-rata per bulan	440	785	985	1738

Sumber : Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, potensi obyek wisata pulau pahawang telah berhasil memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat desa Bejiharjo. Selain penyerapan tenaga kerja, pengelolaan obyek wisata pulau pahawang juga membuka kesempatan bagi masyarakat untuk membuka lapangan pekerjaan yang baru.

Adapaun beberapa faktor penyebab terjadinya konflik dalam pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Pulau pahawang dapat diuraikan dalam beberapa faktor dibawah ini :

a. Faktor Perbedaan Kepentingan Perbedaan

Kepentingan merupakan salah satu faktor yang dapat menimbulkan konflik sosial. Perbedaan kepentingan merupakan sumber lain yang dapat menimbulkan pertentangan baik secara ekonomi, politik, dan sebagainya. Dalam konflik yang terjadi pada

pengelolaan obyek wisata pulau pahawang, perbedaan kepentingan terjadi antara masyarakat desa bejiharjo yang tergabung dalam beberapa kelompok sadar wisata dengan pemilik lahan yang ada di atas obyek wisata Pulau pahawang. Pemilik tanah didalam konflik ini mempunyai kepentingan mempertahankan hak atas kepemilikan tanah yang ada di atas obyek wisata pulau pahawang dan hak pengelolaan obyek wisata tersebut, sedangkan masyarakat desa bejiharjo yang tergabung dalam beberapa kelompok sadar wisata mempunyai kepentingan dalam hal mengakses pengelolaan obyek wisata pulau pahawang dan mempertahankan hak pengelolaan yang sudah di rintis oleh masyarakat.

b. Perubahan Sosial Masyarakat Polemik

Pengelolaan objek wisata pulau pahawang berkaitan erat dengan pergeseran sosial budaya masyarakat sekitar. Dalam perkembangan dunia pariwisata terjadinya polemik merupakan hal yang lumrah. Pertumbuhan wisata Pulau pahawang dalam enam tahun terakhir mengakibatkan adanya pergeseran budaya masyarakat terutama dalam hal pencarian nafkah. Sebelum Pulau pahawang berkembang pesat, masyarakat di sekitar lokasi wisata itu belum pernah berkecimpung di dunia wisata, sebelum adanya pengembangan pariwisata rata-rata masyarakat mencari nafkah dengan bekerja di bangunan, transportasi, serta pertanian. Munculnya dunia wisata di desa pahawang ini telah mengakibatkan adanya perubahan social dalam masyarakat. baik dari segi ekonomi maupun budaya. Kehadiran wisatawan yang silih berganti dengan latar belakang budaya dan karakter yang berbeda berdampak pada perubahan atas budaya dan karakter masyarakat local. Dari segi ekonomi berdampak pada cara masyarakat dalam menambah penghasilan keluarga menjadi begitu mudah ketika dibandingkan pada saat masyarakat disibukkan dalam pengolahan lahan pertanian tentunya akan jauh berbeda. Perubahan yang terjadi dalam masyarakat tersebut membuat terjadi dalam pengelolaan obyek wisata pulau pahawang merupakan konflik horizontal. Konflik horizontal terjadi antara masyarakat dengan masyarakat yaitu antara kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dengan Pokdarwis lainnya dan kelompok sadar wisata dengan pemilik lahan. Konflik ini dapat disebut konflik horizontal karena kedudukan para pelaku konflik statusnya setara.

Dampak Konflik

Adanya konflik tentu membuat banyak dampak bagi masyarakat yang terlibat maupun tidak terlibat dalam suatu konflik, dampak yang ditimbulkan akibat dari suatu konflik tentunya ada yang positif dan ada juga yang berdampak negatif. Dalam konflik yang terjadi pada pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Pulau pahawang dampak yang ditimbulkan dalam masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Dampak Positif

1) Memperjelas Batas – Batas Diri

Setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat memiliki tanggung jawab atas hak dan kewajiban yang mereka miliki. Senada dengan perihal tersebut, konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Pulau pahawang telah memperjelas batasan-batasan yang menjadi hak dari setiap individu masyarakat desa pahawang baik secara pribadi maupun kelompok dan kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi.

2) Adanya Hikmah yang Dapat Dipetik

Ungkapan ambillah hikmah dibalik peristiwa yang terjadi merupakan ungkapan yang sangat tepat untuk menjelaskan adanya hikmah dibalik konflik pengelolaan obyek wisata Pulau pahawang. Dengan adanya konflik yang terjadi dalam pengelolaan obyek wisata pulau pahawang ini, hikmah yang dapat dipetik oleh masyarakat yaitu masyarakat dapat memahami batasanbatasan yang menjadi hak dan kewajiban bagi setiap individu masyarakat dalam pengelolaan obyek wisata pulau pahawang serta masyarakat lebih berhati-hati dan saling menjaga solidaritas guna menjaga keutuhan dan kerukunan ditengah masyarakat desa pahawang.

b. Dampak Negatif

1) Perpecahan Adanya konflik yang terjadi di dalam pengelolaan obyek wisata pulau pahawang berdampak pada berkurangnya tingkat kerukunan dalam

masyarakat, bahkan diantara kelompok masyarakat saling curiga menunjukkan bahwa adanya dampak negative dari konflik tersebut yaitu perpecahan.

- 2) Menimbulkan Prasangka Ngatif Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Obyek Wisata Pulau pahawang berdampak pada prasangka-prasangka negatif yang timbul di tengah masyarakat. Permasalahan yang dapat ditimbulkan dengan adanya prasangkaprasangka negative ditengah masyarakat yaitu dapat menimbulkan ketidak nyamanan yang dirasakan setiap masyarakat.

Aktor-Aktor dalam Konflik

Dalam konflik pengelolaan pariwisata dengan obyek wisata Pulau pahawang ada beberapa aktor yang terlibat, yaitu :

1. Pemerintah Desa Pulau Pahawang
2. Masyarakat Desa Pulau Pahawang
3. Pelaku Jasa Wisata
4. Kelompok Sadar Wisata
5. Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran

Rekomendasi Kebijakan

Adapun kerangka pemecahan masalah yang dapat ditawarkan dan diuraikan adalah dengan resolusi konflik. Menurut Mindes (2006) resolusi konflik merupakan kemampuan untuk menyelesaikan perbedaan dengan yang lainnya dan merupakan aspek penting dalam pembangunan sosial dan moral yang memerlukan keterampilan dan penilaian untuk bernegosiasi, kompromi serta mengembangkan rasa keadilan. Resolusi konflik adalah setiap upaya yang ditujukan untuk menyelesaikan pertentangan atau perselisihan dalam kehidupan manusia. 2019

Ada beberapa cara resolusi konflik yang digunakan dalam proses penyelesaian konflik. Menurut Johan Galtung (1996), konflik dapat dicegah atau diatur jika pihak-pihak yang berkonflik dapat menemukan cara atau metode menegosiasikan perbedaan kepentingan dan menyepakati aturan main untuk mengatur konflik. Johan Galtung kemudian menawarkan

beberapa model yang dapat dipakai sebagai proses resolusi konflik, meliputi peace making, peace keeping, dan peace building.

a. Peace Making

Tahap awal ketika konflik muncul adalah untuk sesegara mungkin menciptakan suatu perdamaian. Perdamaian dapat diwujudkan dengan daya upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan di dalamnya (Galtung dalam Jamil, 2007). Ada beberapa metode yang bisa diterapkan dalam mewujudkan suatu perdamaian ini setidaknya dalam rangkaian perwujudan perdamaian dalam konflik pengelolaan obyek wisata Pulau Pahawang, dapat menggunakan pendekatan resolusi konflik yang dikemukakan oleh: (Ikhsan Malik 2003: Wirawan, 2010 : Mitchel, 2007: Christopher A. Moore dalam Wirawan, 2010) sebagai berikut:

1. Coercive Pemerintah dapat melakukan kebijakan intervensi sebagai upaya untuk mengendalikan konflik dengan pemaksaan secara fisik (coercive Capacity). Hal ini dapat berupa ancaman dan penjatuhan sanksi kepada pihak yang berkonflik. Selain itu coercive juga digunakan dalam tahap genting, terutama dalam hal menghentikan konflik terbuka yang sedang terjadi.
2. Litigasi merupakan penyelesaian konflik dengan mengedepankan jalur hukum sebagai faktor penyelesaiannya, namun di sini perlu dicermati, Pemilihan jalur litigasi untuk menyelesaikan konflik harus dipertimbangkan secara bijak karena memiliki beberapa hambatan. Pertama, proses peradilan menyerap banyak waktu dalam jangka panjang. Kedua, badan peradilan cenderung berpihak kepada penguasa, akibatnya, terdapat kecenderungan untuk mengalahkan kepentingan rakyat tertindas.
3. Non-litigasi merupakan model penyelesaian konflik yang berada di luar pengadilan. Penyelesaian konflik dengan cara non litigasi dapat mengakomodasi segala macam kepentingan yang ada di masyarakat. Model non litigasi biasanya direpresentasikan dalam model negosiasi, mediasi maupun arbitrase, dimana didalamnya biasanya akan mendapatkan suatu kemenangan bersama (win-win solution).

b. Peace Keeping

Menurut Fisher (2001) menjaga perdamaian adalah kegiatan memantau dan menegakkan kesepakatan, menggunakan kekerasan bila perlu. Caranya mencakup pengawasan terhadap dihormatinya kesepakatan dan dilaksanakannya kegiatankegiatan pengembangan diri yang disepakati. Peace keeping pun dalam tata perundangundangan di Indonesia telah diatur dalam UU No 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial terutama yang tertuang dalam pasal 7. Dari hal tersebut dilihat bahwa peace keeping merupakan upaya awal yang dilakukan untuk menghindari agar eskalasi konflik tidak muncul kembali.

c. Peace Building

Tahap krusial selanjutnya setelah peace making dan peace keeping adalah perwujudan Peace building. Berbagai tahap tersebut tidak dapat dipisahkan dari rangkaian resolusi konflik yang dikatakan (Galtung:1996). Menurut Galtung peace building diartikan sebagai strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. Menurut Galtung, proses peace building merupakan proses jangka panjang yang penelusuran dan penyelesaian akar konflik, mengubah asumsi-asumsi kontradiktif, serta memperkuat elemen yang dapat menghubungkan pihak-pihak yang bertikai dalam suatu formasi baru damai mencapai perdamaian positif.

Bibliography

- Afala, L. M. (2017). Menalar Dinamika Konflik Wisata Goa Pindul. *Journal of Governance*, 2(1).
- Apriyani, S., & Rona, A. P. (2023). Strategi Manajemen Konflik Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandar Lampung. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 4(2), 91–100.
- Arisanjaya², I. M. W., & Arimbawa, W. (2021). Konflik Pemanfaatan Ruang Pariwisata Di Wilayah Pesisir Tanah Lot Bali. *Pranatacara Bhumandala: Jurnal Riset Planologi*, 2(1), 65–77.
- Basyori. (2015) Konflik Pengelolaan Kawasan Cagar Alam Pulau Sempu Antara Kebutuhan Konservasi Dan Pariwisata, Universitas Gadjah Mada.
- Binangkit, Gilang. (2016) Konflik Antar Pengelola Pariwisata Goa Pindul, Yogyakarta. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Farihanto, M.N. (2016). Dinamika Komunikasi Dalam Pembangunan Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman. *Jurnal Penelitian Pers Dan Komunikasi Pembangunan Volume 19 Nomor 3*: 203-214.
- Jaya, I. G. F. P., & Mahagangga, I. G. A. O. (2018). Konflik Masyarakat Lokal Dengan Pengusaha Pariwisata Terkait Akses Pura Batu Mejan Dan Setra Di Desa Canggu, Kabupaten Badung. *Jurnal Destinasi Pariwisata*, 6(1), 55.
- Kurniati, N., Lubis, D., Kinseng A. (2021). Manajemen Konflik Dalam Pengembangan Wisata Desa Cibitung Wetan, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sosiologi Pedesaan* (Vol. 9, Issue 03).
- Meriwijaya, Suranto (2016) Konflik Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Prosiding Konferensi Nasional Ke-5

Nyoman, N., & Nalayani, A. H. (2016). Evaluasi Dan Strategi Pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Badung, Bali. Jumpa (Vol. 2).

Sekarningrum A.A, Lestari P, Suparno B.A. (2019) Manajemen Konflik Komunikasi Dalam Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 17 Nomor 3 : 262-279.

Sukmawan, Y. D., & Kholifah R, E. (2023). Konflik Kepentingan dalam Penyelenggaraan Pageant Serta Hubungannya dengan Pengembangan Pariwisata. *Pubmedia Social Sciences and Humanities*, 1(3), 1–15.

Peraturan Desa Pulau Pahawang No. 02 Tahun 2023 Tentang Pungutan Desa.

Peraturan Bupati Pesawaran Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Kepariwisata.

Putu, N., Mahadewi, E., & Sudana, P. (2017). Model Strategi Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat (Vol. 17).

Widiyanto, D., Purwo Handoyo, J., & Fajarwati Program Studi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi Ugm Abstrak, A. (2008). Pengembangan Pariwisata Perdesaan (Suatu Usulan Strategi Bagi Desa Wisata Ketingan). Jurnal Bumi Lestari (Vol. 8).